

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa:

1. Hakim dalam menangani kasus pernikahan wanita muallaf yang menggunakan wali muhakkam, melakukan proses pertimbangan, konstruksi hukum, dan pembangunan argumentasi yang komprehensif. Pertama, hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan menganalisis latar belakang kasus, termasuk status wanita muallaf dan ketiadaan wali nasab yang memenuhi syarat. Fakta hukum seperti dokumen pernikahan, bukti status agama, dan pernyataan saksi menjadi landasan awal dalam memahami konteks kasus. Hakim juga mengintegrasikan ketentuan syariat Islam dan hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, untuk memastikan keputusan yang sah dan adil.
2. Hakim menggunakan metode penalaran, penemuan, dan penafsiran hukum yang sistematis dalam mengkonstruksi hukum. Hakim mengidentifikasi kekosongan norma dalam hukum positif terkait wali muhakkam dan menggunakan metode seperti analogi, istinbath hukum, dan prinsip maslahat untuk menyesuaikan ketentuan hukum Islam dengan konteks kasus. Prinsip maqashid syariah menjadi panduan utama untuk memastikan keputusan yang diambil memberikan kemaslahatan bagi wanita muallaf.
3. Hakim membangun argumentasi yang kokoh dengan mendasarkan pada dua pilar utama: dasar syar'i dan dasar hukum nasional. Dari perspektif syar'i, hakim merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama yang menegaskan pentingnya kehadiran wali sebagai rukun pernikahan. Dalam konteks hukum nasional, hakim merujuk pada Pasal 14 dan pasal 23 KHI dan Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan kewenangan

kepada pengadilan agama untuk menunjuk wali hakim.

4. Hakim melalui penetapannya yang menyatakan sah pernikahan wanita muallaf menggunakan wali muhakkam menunjukkan bahwa hakim/pengadilan agama telah melindungi agama, keturunan serta masa depan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita muallaf dimaksud, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim dalam hal ini telah menjaga kehidupan.

5.2 Rekomendasi

Bahwa untuk mengatasi persoalan adanya pernikahan wanita muallaf yang menggunakan wali muhakkam, disebabkan sulit bagi wali hakim melaksanakan tugasnya sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan ini, maka studi ini merekomendasikan agar pihak-pihak terkait sebelum melaksanakan pernikahan atau ijab kabul, terlebih dahulu mengajukan perkara permohonan penetapan wali nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama lah yang menunjuk wali nikah bagi wanita muallaf dimaksud melalui penetapan. Hal ini dapat diqiyaskan atau dipersamakan halnya dengan permohonan penetapan wali adhal.

5.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Keputusan ini membawa dampak dalam memastikan harmoni antara syariat Islam dan hukum positif di Indonesia, serta memiliki implikasi yang luas dalam aspek hukum, sosial dan kelembagaan.

1. Implikasi Hukum

Keputusan hakim yang menetapkan sahnya pernikahan wanita muallaf dengan wali muhakkam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hakim menyatakan bahwa pernikahan wanita muallaf yang menggunakan wali muhakkam adalah sah, dengan tujuan memelihara dan melindungi agama, serta memberikan perlindungan terhadap anak dan masa depannya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi persoalan modern tanpa mengabaikan esensi syariat.

Dengan penalaran berdasarkan *maqashid syariah*, hakim mampu mengisi kekosongan norma hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan nasional. Penafsiran hukum yang relevan dengan konteks modern memberikan legitimasi pada keputusan yang diambil, sekaligus menciptakan preseden hukum yang dapat digunakan dalam kasus serupa di masa depan. Hasil ini juga memperkuat otoritas pengadilan agama sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memastikan sahnya pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan hukum nasional.

2. Implikasi Sosial

Keputusan ini memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama bagi wanita muallaf yang berada dalam situasi rentan di daerah dengan mayoritas non-Muslim. Dengan adanya kepastian hukum tentang penggunaan wali muhakkam, hak-hak wanita muallaf dalam pernikahan dapat dilindungi secara adil. Keputusan ini juga memberikan pesan penting kepada masyarakat bahwa hukum Islam dapat diimplementasikan secara relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam tataran masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya wali yang sah dalam hukum Islam. Hal ini berpotensi mengurangi stigma atau ketidakpahaman terkait peran wali muhakkam, sehingga masyarakat lebih menerima keputusan pengadilan yang memberikan solusi bagi pernikahan wanita muallaf.

3. Implikasi Kelembagaan

Penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, seperti pengadilan agama, Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam menangani kasus yang melibatkan wali muhakkam. Implikasi praktisnya adalah pentingnya menyediakan pelatihan bagi hakim, penghulu, dan petugas KUA untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang *maqashid syariah*, metode penemuan hukum, dan penafsiran hukum yang relevan dengan kondisi modern. Pengadilan agama juga perlu mengembangkan pedoman yang lebih terperinci terkait prosedur permohonan isbat nikah yang salah satu pihak pemohonnya adalah muallaf, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Selain itu, KUA dan lembaga terkait

perlu meningkatkan layanan konsultasi hukum bagi wanita muallaf, termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil jika wali nasab tidak dapat memenuhi syarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1996).
- Abdullah, A. (2019). *Fiqh dan Realitas Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, Y. (2019). *Fiqh Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, Y. (2019). *Islamic Jurisprudence in the Modern World*. New York: Oxford University Press.
- Abdurrahman Wahid, dkk. *Pesantren Dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES. 1974).
- Abu Al-Hasyim, M. (2021). *Maqashid al-Shari'ah dan Penerapannya dalam Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Aditya, P. (2018). *Fiqh Munakahat: Perspektif Maqashid al-syariah*. Surabaya: UIN Press.
- Adnan Buyung Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Al- Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H).
- Al-Azhar, M. (2018). *Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Peradilan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Azhar, M. (2018). *The Role of Judges in Islamic Family Law*. New Delhi: Sage Publications.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. (2001). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid 2, (Saudi Arabia: Dar ibn Affan, 1997).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid II. (Bairut: Dar al-Qutub al-Arabi, 2002).
- Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2005). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jld. 2 (Jakarta: Kencana, 2011).
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Andi hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008).
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka

- Cipta, 2006).
- Arsyad, M. (2019). *Fiqih Peradilan: Prinsip dan Praktik*. Malang: UMM Press.
- Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No.1/1947*, (Jakarta: Pt Dian Rakyat, 1986).
- Aziz, N. (2018). *Problematisa Hukum Islam dalam Kehidupan Modern*. Surabaya: UIN Press.
- Aziz, N. (2018). *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Surabaya: UIN Press.
- Creswell W. John. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
- Darwis, H. (2020). *Kepastian Hukum dalam Peradilan Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Depag, 1997).
- Deprtemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997).
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).
- Djubaidah Neng. *Pencataatn Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hokum Tertulis di Indodesia dan Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Fadli, R. (2017). *Kontekstualisasi Fiqih Keluarga*. Yogyakarta: LKiS.
- Fitri, Z. (2016). *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern*. Malang: UMM Press.
- Fitri, Z. (2016). *Wali dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Malang: UMM Press.
- Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*. (Kencana. Jakarta. 2005).
- H. M. Soleh Amanar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- H. Mahmud S. Taufiq, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- H. Mahmud S. Taufiq, *Hukum Keluarga Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014).
- H. Musa Asy'arie, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013).
- Hakim Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Hakim, I. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Halim, M. (2020). *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: UIN Press.

- Harun, F. (2016). *Rekonstruksi Hukum Islam: Sebuah Kajian Kritis*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, A. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, A. (2017). *Prinsip Dasar Fikih Munakahat*. Bandung: Alfabeta.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Imam Nawawi, *Raudatut At-Talibin*, Juz 5, (Beirut: Darul Alam, 2003).
- Khalid, Z. (2016). *Foundations of Islamic Legal Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Khalid, Z. (2016). *Interpretasi Hukum Islam: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Lazarsfeld, P. F., & Henry, N. W. (2020). *Research Design in Social Research*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- M. Khanif, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Klik.R, 2007).
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978).
- Mohammad Hashim Kamali, *Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008).
- Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Surabaya: Dar al-ihya, 1999).
- Muhammad, F. (2015). *Marriage and the Role of Wali in Islamic Law*. London: Routledge.
- Muhammad, F. (2015). *Teori Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mulyana, D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. (Semarang: Bulan Bintang, 1955).
- Mustofa, R. (2017). *Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, R. (2017). *Teori Hukum Islam dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Nurdin, M. (2018). *Pengantar Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, A. (2017). *Contemporary Issues in Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahman, A. (2017). *Hukum Islam dan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, M. (2020). *Hukum Islam dalam Praktik Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, M. (2020). *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*.

Jakarta: Rajawali Pers.

Rofiq Ahmd. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988).

Satria Effendi M Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana 2004).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Muhammd Thalib, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004).

Sihombing, L. (2016). *Peta Agama di Nusa Tenggara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siti Musdah Mulia, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, H. (2016). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suryadi, H. (2016). *Kompilasi Hukum Islam: Sebuah Analisis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Syafii, I. (2019). *Fiqih Nikah dan Wali*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Syafii, I. (2019). *Prinsip Dasar Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Syahrul Saad, *Hukum Keluarga dan Kewarisan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2010).

Syaiful Anwar, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al-'Urusy w a bil Hajah al - Nufus*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005).

Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al-'Urusy w a bil Hajah al - Nufus*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005).

Syihab, Q. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Lentera Hati.

Tjai F. Nasir, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Wahid, M. (2019). *Problematika Wali Hakim dalam Peradilan Agama*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Wahid, M. (2019). *Wali Hakim dalam Peradilan Agama di Indonesia*. Semarang:

Pustaka Rizki Putra.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al Quran, 1973).

Yusuf, M. (2021). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Zulkarnain, A. (2021). *Ijtihad dalam Sistem Hukum Islam*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Zulkarnain, A. (2021). *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Medan: USU Press.

Jurnal:

A'isyah, S., & Silvia Airin. (2019). Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Kota Malang. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 2(02), 84–114. <https://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153>

Agustin, R., Saiban, K., & Hazin, M. (2022). Problematika pendidikan agama islam di daerah minoritas muslim. *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(02), 153-160. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.1027>

Ahsanicka, A. (2024). Kepastian hukum penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli tanah di wilayah kabupaten badung provinsi bali. *ijlj*, 1(4), 15. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2792>

Aisyah, N. (2018). Peranan hakim pengadilan agama dalam penerapan hukum islam di indonesia. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>

A'isyah, S., & Airin, S. (2018). Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Kota Malang. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 2(02), 84-114.

Alkudri, T. and Jadmiko, R. (2022). Kontribusi wali murid dalam membantu proses belajar siswa sdn 03 sambirobyong. *Sultra Educational Journal*, 2(2), 145-152. <https://doi.org/10.54297/seduj.v2i2.286>

Aminudin, C. (2020). Interaksi hukum dan sains dalam pencarian kebenaran dalam proses peradilan. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(3), 404-411. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2020.19.3.8>

Aminudin, C. (2024). Peranan bukti ilmiah (scientific evdence) dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup. *Iblam Law Review*, 4(1), 265-275. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.264>

Amiri, K. (2023). Upaya kantor urusan agama dalam mencegah perkawinan dini di kecamatan lolak, bolaang mongondow. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2830>

Anggelia, A. and Purwanti, A. (2020). Kebijakan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual melalui nikah siri dalam perspektif hukum nasional di indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109-126.

<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>

- Anto, A. (2024). Problematika pernikahan yang tidak dicatatkan di kalimantan utara. *alfikrah*, 4(1), 78-92. <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v4i1.615>
- Ardani, M. (2024). Analisis yuridis isbat nikah terhadap status hukum anak hasil nikah siri berdasarkan kompilasi hukum islam. *ijlj*, 1(4), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>
- Badri, M. (2020). Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3). Retrieved from <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/608>
- Bakari, M. and Darwis, R. (2019). Analisis yuridis terhadap perkawinan perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama. *Al-Mizan*, 15(1), 1-32. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>
- Bordalo, P., Gennaioli, N., & Shleifer, A. (2015). Salience theory of judicial decisions. *The Journal of Legal Studies*, 44(S1), S7-S33. <https://doi.org/10.1086/676007>
- Burns, K., Dioso-Villa, R., & Rathus, Z. (2016). Judicial decision-making and 'outside' extra-legal knowledge: breaking down silos. *Griffith Law Review*, 25(3), 283-290. <https://doi.org/10.1080/10383441.2016.1264100>
- Callander, S. and Clark, T. (2017). Precedent and doctrine in a complicated world. *American Political Science Review*, 111(1), 184-203. <https://doi.org/10.1017/s0003055416000587>
- Clark, T. (2015). Scope and precedent: judicial rule-making under uncertainty. *Journal of Theoretical Politics*, 28(3), 353-384. <https://doi.org/10.1177/0951629814568397>
- Danil, M. (2019). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Ahkam*, 10(2), 1-29. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v10i2.1857>
- Desiroto, F. (2024). Analisis pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam putusan narkoba (studi putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor 372/pid.sus/2022/pn. jkt pst). *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 3916-3925. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1187>
- Desmon, A., Angelia, R., & Erwin, R. (2023). Pemeriksaan setempat oleh hakim dalam perkara pidana. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 345. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6805>
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>
- Dewi, A. (2018). Urgensi hermeneutika hukum dalam memahami problem.

- Kertha Patrika, 39(03), 160. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p02>
- Dharma, A. (2024). Prinsip the best interests of the child dalam perwalian anak: studi penetapan nomor 0053/pdt.p/2017/pa.tpi. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 120-129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
- Dharmawan, R., Hermanto, Y., & Simanjuntak, F. (2022). Pernikahan beda keyakinan menurut i korintus 7:12-16 dan relevansinya dalam pluralitas agama di indonesia. *Visio Dei Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 251-265. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v4i2.351>
- Dhiani, S. (2024). Tinjauan terhadap perkawinan siri dalam prespektif hukum islam, hukum positif dan asasi manusia di kabupaten kampar. *JIMR*, 2(6), 457-463. <https://doi.org/10.62504/jimr625>
- Erfiana, E. (2021). Tinjauan maslahat al mursalat terhadap penerapan peraturan menteri agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 187-213. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3543>
- Fahrudin, A. (2024). Hukum pidana dan konflik agama: menganalisis kasus penistaan agama dan dampak sosialnya. *HMRM*, 1(4), 116-123. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.32>
- Faiz, M. (2024). Kajian literatur terhadap tantangan dan prospek fikih minoritas di kalangan muslim barat. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 2(3), 349-362. <https://doi.org/10.57096/lentera.v2i3.105>
- Fauzi, R., & Arfa, F. (2023). Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat. *Journal on Education*, 5(4), 12108-12116. Retrieved from <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2171>
- Fauzi, R., & Arfa, F. A. (2023). Praktik Wali Muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat. *Journal on Education*, 5(4), 12108-12116.
- Filzah, N. (2021). Perlindungan dan kemanfaatan hukum terhadap putusan itsbat nikah di mahkamah syar'iiyyah bireun (analisis putusan perkara no. 82/pdt.p/2019/ms-br). *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 122. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9368>
- Ginting, N. (2024). Disparitas hukuman hakim terhadap para terpidana penyerobotan tanah (studi putusan no. 85k/pid/2017 dan no. 28pk/pid/2019). *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 21-27. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15518>
- Gunawan, E. (2013). Nikah siri dan akibat hukumnya menurut uu perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>
- Habibi, U. (2014). Kepuasan pernikahan pada wanita yang dijodohkan oleh orang tua. *Psikoborneo Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(4). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v2i4.3675>

- Hafid, M. B., & Taufik, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 1-34. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>
- Harefa, N., Manik, G., Marpaung, I., & Batubara, S. (2020). Dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (pns): studi kasus putusan pengadilan negeri medan nomor: 73/pid.sus-tpk/2018/pn.mdn. *Sign Jurnal Hukum*, 2(1), 30-42. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>
- Harianti, I. (2019). Penjatuhan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 9-21. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.142>
- Holili, H. (2024). Kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum di indonesia sebagai penganut sistem civil law. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3718-3726. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>
- Horii, H. (2020). Legal reasoning for legitimation of child marriage in west java: accommodation of local norms at islamic courts and the paradox of child protection. *Journal of Human Rights Practice*, 12(3), 501-523. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>
- Hunt, I. (2019). Probability reasoning in judicial fact-finding. *The International Journal of Evidence & Proof*, 24(1), 75-94. <https://doi.org/10.1177/1365712719875753>
- Hutajulu, M. (2015). Filsafat hukum dalam putusan pengadilan/hakim. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>
- Isnantiana, N. (2017). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Iswantoro, I. and Tobroni, F. (2022). Rationalization of islamic legal considerations in marriage dispensation: a lesson from katingan, central kalimantan. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 301-314. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7074>
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan hukum oleh hakim dan implikasi terhadap perkembangan praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 45-56. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112>
- Itryah, I. and Ananda, V. (2023). Persiapan pernikahan dengan pendekatan psikologis di kelurahan 8 ulu kabupaten banyuasin, sumatera selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 759-766. <https://doi.org/10.54082/jamsi.744>
- Jafar, I. (2023). Analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara

- pemeliharaan anak akibat perceraian. JCS, 2(5), 1201-1208. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.337>
- Jalili, A. (2019). Konsep rukshah dan implementasinya dalam hukum pernikahan. Perada, 1(2), 111-118. <https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>
- Jannah, R. and Halim, A. (2022). Edukasi pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian perspektif hukum islam dan hukum positif. Amalee Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 3(1), 167-178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Jaya, K. and Halim, M. (2022). Menelisik putusan hakim dalam tindak pidana kesusilaan pada putusan nomor: 06-k/pm/iii- 16/al/i/2017. Buletin Poltanesa, 23(2). <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2043>
- Juanda, E. (2017). Penalaran hukum (legal reasoning. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 157. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>
- Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum, (*Legal Reasoning*). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 157-167.
- Kamijan, K. (2021). Studi kritis ditolak dan diterima dispensasi kawin di pengadilan agama muara teweh. Jurnal Sosial Sains, 1(8), 758-768. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.175>
- Karisa, I. (2020). Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak (studi kasus putusan pengadilan negeri klaten nomor: 35/pid.sus.anak/2014.pn.kln). Verstek, 8(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di indonesia. Al-Adl Jurnal Hukum, 6(11). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Khamdiyati, L. (2022). Pandangan hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan. Sakina, 6(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2242>
- Kuncoro, S. (2023). Basis nilai penalaran hukum non-sistemik dalam kerangka dialektika penalaran hukum sistemik ke arah penalaran hukum non sistemik. Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(6), 525-538. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.602>
- Kushadianto, M. (2024). Implikasi hierarki hukum dalam pembentukan undang-undang: pengaruhnya terhadap penafsiran dan penegakan hukum. Syntax Idea, 6(3), 1476-1484. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133>
- Lesmana, Y. (2020). Modalitas hakim progresif. Verstek, 8(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44116>
- Leszczyński, L. (2020). Extra-legal values in judicial interpretation of law: a model reasoning and few examples. International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale De Sémiotique Juridique, 33(4), 1073-1087.

<https://doi.org/10.1007/s11196-020-09773-y>

- Li, J., (2024). Clarification of the natural interpretation in criminal law—on the discretion of criminal justice. *Academic Journal of Humanities & Social Sciences*, 7(4). <https://doi.org/10.25236/ajhss.2024.070408>
- Li, Y. (2020). Analysis on uncertainties in judicial decision based on cognitive psychology. *Revista Argentina De Clinica Psicologica*. <https://doi.org/10.24205/03276716.2020.142>
- Loim, J. (2023). Disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 369-385. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.775>
- Lubis, I., Riza, K., & Suwalla, N. (2023). Sidang itsbat bagi pasangan nikah siri ditinjau dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 59-65. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1575>
- Lumbanraja, A., Yusriadi, Y., & Shidarta, S. (2023). Legal interpretation in judicial decision making on environmental cases: judges in the domination of civil law system.. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326268>
- Maharani, M. (2024). Kesesuaian penjatuhan putusan di bawah minimum tindak pidana narkoba oleh hakim. *Verstek*, 12(2), 53. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83634>
- Mahfudhi, H. (2022). Corak pemikiran imam abu hanifah dan relevansinya dengan hukum nikah tanpa wali. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 29-37. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.57>
- Majeed, N. (2022). Exploring generalizations: a doctrinal analysis of meanings, kinds, and its function in the judicial process of proof. *Pakistan Languages and Humanities Review*, 6(II). [https://doi.org/10.47205/plhr.2022\(6-ii\)48](https://doi.org/10.47205/plhr.2022(6-ii)48)
- Makarimi, F. (2023). Pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri menopause perspektif masalah al-syathibi (studi putusan nomor 4877/pdt.g/2021/pa.kab.mlg). *Sakina*, 7(1), 31-39. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2566>
- Manan, A. (2013). Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara di peradilan agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>
- Masthuro, M. (2023). Manfaat memahami hukum acara pidana untuk masyarakat dan mahasiswa sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan kusuma negara jakarta. *Jurnal Ilmu Pendidikan (Jip) Stkip Kusuma Negara*, 14(2), 168-176. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553>
- Mikštienė, R. and Keršulienė, V. (2016). Legal decision support system application possibility in corporate governance.. <https://doi.org/10.3846/bm.2016.39>
- Mubarok, A. and Hidayati, T. (2023). Pencatatan pernikahan di indonesia ditinjau

- dari maqashid al-syariah jasser auda. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157-170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>
- Munthe, H., Prasetya, N. H., & Harahap, A. M. (2022). Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No. 197/Pdt. P/2020/Pa. Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad Al Zariyah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02). <http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i02.3990>
- Musa, M. (2023). Matinya rule breaking : postulat penalaran hakim dalam memutus bebas perbuatan cabul (kajian putusan bebas perkara no.46/pid.b/2022/pn pbr). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 285-306. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.285-306>
- Mustafa, A. (2021). Corak putusan hakim terhadap putusan pernikahan dengan wali muhakkam. *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 88-99. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57>
- Mustafa, A. D. (2021). Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(1), 88-99.
- Mustika, D. and Marlina, S. (2019). Integrated marriage itsbat: analyzing the polemics behind its implementation. *Mazahib*, 44-75. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1344>
- Muzakka, I. (2023). Kedudukan wali dalam pernikahan studi komparasi empat madzhab. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 90-104. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>
- Nabila, R. (2023). Analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 117-122. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2920>
- Nabilah, W., & Hayah, Z. (2023). Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid al-syariah). *El-Hekam*, 7(1), 39-49. <http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5810>
- Nawawi, M., Sulastri, S., Edi, R., & Setiawan, A. (2022). Harmonization of islam and human rights: judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in sukadana, indonesia. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 117-134. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-134>
- Novianto, W. (2015). Penafsiran hukum dalam menentukan unsur-unsur kelalaian malpraktek medik (medical malpractice. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8670>
- Novriansyah, N. (2022). Keberadaan sistem hakim komisaris sebagai alternatif pengganti sistem praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. *Sol Justicia*, 5(1), 113-122. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.491>

- Nurdiansari, A. and Kusuma, R. (2022). Pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan wali adhal di pengadilan agama sumbawa besar. *Private Law*, 2(2), 374-380. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1168>
- Nurjaman, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dibawah Tangan Dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0020/Pdt. P/2012/Pa. Smi.). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 8(2), 30-40.
- Pratama, Y. (2024). Peninjauan kembali tingkat kedua dalam perkara tindak pidana korupsi. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 3(1), 20-25. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1114>
- Prayitno, D. (2020). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan Sirri Dengan Wali Muhakkam Pada Putusan Nomor 130/PDT. P/2019/PA. BBS* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam independensi hakim di indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112-122. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>
- Rahadian, M. (2024). Rekonstruksi fikih wali muhakkam dalam perkara pengesahan nikah. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1878. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3492>
- Rahman, H., Parman, L., & Ufran, U. (2023). Kedudukan tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana tppu (studi putusan nomor 516/pid.sus/2022/pn mataram). *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1225-1234. <https://doi.org/10.47679/ib.2023545>
- Ramadhan, A. (2024). Asas keadilan putusan pengadilan dalam gugatan wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli apartemen. *ijlj*, 1(4), 15. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2667>
- Rasyid, L. (2019). Penerapan norma adat terang dan tunai dalam praktek peradilan perdata (kajian putusan pengadilan nomor: 23/pdt.g/2013/pn.bj). *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2244>
- Riesthuis, T. (2023). The legitimacy of judicial decision-making: towards empirical scrutiny of theories of adjudication. *Utrecht Law Review*, 19(2), 75-86. <https://doi.org/10.36633/ulr.877>
- Rizal, S., & Fuad, Z. (2023). The Validity Of Wali Muhakkam In The Practice Of Unregister Marriages And Legal Consequences At East Aceh Regency. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(2). <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v22i2.3008>
- Rufaidah, R. (2023). Inkonsistensi putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkoba dengan pelaku anak. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 207. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.516>

- Sakarani, N. (2024). Konsekuensi yuridis atas putusan pengadilan yang terikat dalam perjanjian arbitrase (studi putusan nomor 420/pdt.g/2020/pn jkt. sel). *Amnesti Jurnal Hukum*, 6(1), 162-173. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.3980>
- Salman, R. (2018). Judicial activism or self-restraint: some insight into the indonesian constitutional court.. <https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.32>
- Salsabillah, M. (2023). Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandung. *Sakina*, 7(4), 451-463. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.3712>
- Setiawan, H., Kalo, S., Ekaputra, M., & Yunara, E. (2021). Penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba (analisis putusan nomor: 669/pid.sus/2018/pn.btm). *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.132>
- Siahaan, A. (2023). Kewenangan hakim judex jurist dalam merubah putusan diluar dakwaan pada tingkat kasasi dalam perkara narkoba. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 937-944. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.256>
- Simon, D. and Scurich, N. (2011). Lay judgments of judicial decision making. *Journal of Empirical Legal Studies*, 8(4), 709-727. <https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2011.01238.x>
- Sinambela, M. (2023). Disparitas pemidanaan terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 76-98. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.43>
- Siswanto, W. (2024). Argumentasi hukum pembatalan sengketa bisnis badan arbitrase nasional (bani) oleh pengadilan negeri. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(6). <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i6.63>
- Slihah, M. (2019). Penyelesaian sengketa akad yad dhamanah di pengadilan agama blitar menurut hukum ekonomi syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2927>
- Solahudin, .. (2023). Analisis hukum pernikahan menggunakan wali hakim persfektif hukum islam dan kompilasi hukum islam. *As-Sakinah*, 1(1), 79-88. <https://doi.org/10.51729/sakinah11133>
- Suarajana, S. (2023). Perpindahan wali nasab kepada wali hakim menurut hukum islam. *AB*, 3(2), 53-60. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.73>
- Suharsono, A. (2023). Argumentasi hukum hakim agung dalam putusan sengketa pajak pertambahan nilai penjualan agunan oleh perusahaan jasa keuangan. *Jurnal Yustitiabelen*, 9(1), 24-38. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i1.588>
- Sujono, I. (2022). Urgensi penemuan hukum dan penggunaan yurisprudensi dalam kewenangan mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 585.

<https://doi.org/10.31078/jk1835>

- Sulaiman, . Y. ., & Sandra, A. . (2022). Keabsahan Wali Muhakam Dalam Nikah Siri Di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif Fiqh. *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 49–76. Retrieved from <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/jhk/article/view/22>
- Sumawan, I. (2023). Pengaruh psikologis hakim terhadap ratio decidendi dalam perkara korupsi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 58-67. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200>
- Supraptiningsih, U. and Bariyyah, K. (2019). Marriage settlement among minority moslem by datok imam masjid in south thailand. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), 221-236. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2631>
- Suryaningsih, N. (2023). Implementation of the passing off doctrine as a legal discovery by judges in indonesia. *European Journal of Law and Political Science*, 2(6), 28-37. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.118>
- Suryanto, D. (2024). Dinamika pelaksanaan hukum adat dayak ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di kalimantan tengah. *Vyavahara Duta*, 19(1), 68-76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>
- Susanti, N. (2022). Studi analisis terhadap putusan pengadilan agama nomor : 34/pdt.p/2019/pa.dum tentang penolakan dispensasi kawin ditinjau dari maqasid syariah. *Jurnal Az-Zawajir*, 2(1), 44-53. <https://doi.org/10.57113/jaz.v2i1.111>
- Sutatiek, S. (2013). Akuntabilitas moral hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar putusannya berkualitas. *Arena Hukum*, 6(1), 1-21. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.1>
- Syafi'i, A. (2023). Penetapan perkara nomor 453/pdt.p/2022/pa.kng tentang isbat nikah perkawinan di bawah tangan: suatu tinjauan maqashid al-syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 111-121. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.219>
- Syahrani, S. (2022). Peran wali kelas dalam pembinaan disiplin belajar di pondok pesantren anwarul hasaniyyah (anwaha) kabupaten tabalong. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(1), 50. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i1.763>
- Syukur, A. K. (2014). Pernikahan dengan Wali Muhakam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68>
- Tampubolon, M., Situmeang, T., & Saragih, P. (2023). Judicial breakfast as an external factor in judicial decision making in courts. *F1000research*, 12, 9. <https://doi.org/10.12688/f1000research.126482.1>
- Teclaw, B. (2018). Legal argumentation and chaim perelman's "the new rhetoric" as "third way" in the theory and philosophy of law - between positivist

- paradigm and legal hermeneutics. *Studia Z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych Miscellanea*, VIII(z. 2), 211-226. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0372>
- Tjangkung, I. (2023). Praktek perjanjian pra nikah di kabupaten manggarai (studi kasus di kelurahan pitak kabupaten manggarai). *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 579-588. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i6.617>
- Vlek, C. (2010). Judicious management of uncertain risks: ii. simple rules and more intricate models for precautionary decision-making. *Journal of Risk Research*, 13(4), 545-569. <https://doi.org/10.1080/13669871003629903>
- Voorhoeve, M. (2012). Judicial discretion in tunisian personal status law.. <https://doi.org/10.5040/9780755692842.ch-008>
- Wahyudi, A. (2021). Dialektika penalaran hukum sistemik ke arah penalaran hukum non-sistemik: basis nilai penalaran hukum non-sistemik. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 127-142. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.4030>
- Wahyuni, D. (2023). Akibat hukum terjadinya kekosongan terhadap organ-organ yayasan yang sudah habis masa kepengurusannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2032-2044. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.414>
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>
- Wardani, D., Lazuardi, L., Mahendradhata, Y., & Kusnanto, H. (2013). Pentingnya analisis cluster berbasis spasial dalam penanggulangan tuberkulosis di indonesia. *Kesmas National Public Health Journal*, 147. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v0i0.391>
- Wibowo, A. and Widiyasmoko, I. (2021). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus: studi perkara tindak pidana narkotika. *Undang Jurnal Hukum*, 4(2), 345-369. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>
- Wijonarko, P. (2023). Penerapan dan kontribusi kecerdasan buatan chatgpt untuk menafsir teks hukum (studi kasus penafsiran pasal 10, pasal 13, permenkes no.889 tahun 2011). *Jurnal Kajian Teknik Elektro*, 8(2), 37-44. <https://doi.org/10.52447/jkte.v8i2.7061>
- Zahid, M. (2013). Keabsahan Pengangkatan Wâlîmuhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syâfi'î. *Karsa Journal of Social and Islamic Culture*, 20(2), 297-311. <https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.48>
- Zahrah, F. and Patimah, P. (2020). Realisasi isbat nikah pada pelaksanaan sidang terpadu di pengadilan agama. *Qadauna*, 1(2), 11-30. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.13016>
- Zhang, N. (2023). The application of cognitive neuroscience to judicial models: recent progress and trends. *Frontiers in Neuroscience*, 17.

<https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1257004>

- Zuhdi, S., Dimiyati, K., Absori, A., Wardiono, K., & Syafirah, F. (2023). Divorce in kangean islands: the study on judge's legal reasoning of kangean religious court, 2020-2022. *Jurnal Jurisprudence*, 12(2), 166-187. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1229>
- Zulfikar, F. and Rahman, A. (2021). Kekuatan testimonium de auditu pada pembuktian perkara perceraian di pengadilan agama. *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Iain Mataram*, 13(1), 57-70. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3482>